

INOVASI PEMERINTAH KOTA DI DALAM PEMANFAATAN SAMPAH ORGANIK DI KOTA BANJAR

Rudiana

Universitas Galuh

Otong Husni Taufiq

Universitas Galuh

Abdul Mutholib

Universitas Galuh

Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik

Jalan R.E. Martadinata No. 150, Ciamis, Jawa Barat 46213

rudirudiana304@gmail.com

Abstract *This research was conducted because it is known that the City Government of Banjar still lacks innovation in the management of organic waste. Therefore, the objective of this research is to understand the innovations of the city government in utilizing organic waste in Banjar City. The method used is descriptive with a qualitative approach. The results of the study conclude that the City Government of Banjar has issued policies that formally regulate the management of organic waste, such as the Mayor's Regulation Number 18 of 2022. In addition, budget allocations in the local government budget for organic waste management programs are also available. However, this allocation is still limited and not yet fully adequate to meet all sustainable management needs. The implementation of organic waste sorting at the household level has started to be applied, especially in areas that have received socialization and assistance. However, the use of technology such as composters and biodigesters is still not optimal due to a lack of socialization, minimal technical personnel, and limited budgets and human resources. The processed organic waste products such as compost and maggot feed have been produced and utilized, but they have not developed to their full potential. The main obstacle lies in the weak marketing of the products and the absence of a sustainable distribution system. The City Government of Banjar has successfully raised public awareness through campaigns such as 'Waste Sorting Movement from Home' as well as utilizing social media and environmental slogans like 'Green Banjar'. This effort is considered successful because environmental messages have reached the public, although there is still a need for visual reinforcement such as the use of mascots.*

Keywords: Innovation, Organic waste management.

Abstrak Penelitian ini dilakukan karena diketahui bahwa Pemerintah Kota Banjar masih kurang melakukan inovasi terhadap pengelolaan sampah organik. Maka tujuan penelitian ini adalah untuk ntuk mengetahui inovasi pemerintah kota di dalam pemanfaatan sampah organik di Kota Banjar. Metode yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian disimpulkan bahwa Pemerintah Kota Banjar telah menerbitkan kebijakan yang mengatur pengelolaan sampah organik secara formal, seperti Peraturan Wali Kota Nomor 18 Tahun 2022. Selain itu, alokasi anggaran dalam APBD untuk program pengelolaan sampah organik juga telah tersedia. Namun, alokasi ini masih terbatas dan belum sepenuhnya memadai untuk menjangkau seluruh kebutuhan pengelolaan yang berkelanjutan. . Pelaksanaan pemilahan sampah organik di tingkat rumah tangga sudah mulai diterapkan, terutama di lingkungan yang telah mendapat sosialisasi dan pendampingan. Akan tetapi, penggunaan teknologi seperti komposter dan biodigester masih belum optimal karena kurangnya sosialisasi, minimnya tenaga teknis, serta keterbatasan anggaran dan SDM.; Hasil olahan sampah organik seperti kompos dan pakan maggot telah dihasilkan dan digunakan, namun belum berkembang secara maksimal. Hambatan utama terletak pada pemasaran produk yang masih lemah dan belum adanya sistem distribusi berkelanjutan. emerintah Kota Banjar telah berhasil membangun kesadaran masyarakat melalui kampanye seperti “Gerakan Pilah Sampah dari Rumah” serta pemanfaatan media sosial dan slogan lingkungan seperti “Banjar Hijau”. Upaya ini dinilai berhasil karena pesan lingkungan telah sampai ke masyarakat meski masih perlu penguatan secara visual seperti penggunaan mascot.

Kata Kunci:Inovasi, Pengelolaan sampah organik

PENDAHULUAN

Permasalahan sampah merupakan salah satu isu lingkungan yang kompleks dan terus berkembang di Indonesia. Seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk, urbanisasi, dan pola konsumsi masyarakat, volume timbulan sampah semakin hari semakin meningkat. Berdasarkan data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Indonesia menghasilkan lebih dari 67 juta ton sampah setiap tahunnya, dengan sekitar 60% di antaranya merupakan sampah organik. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas sampah yang dihasilkan masih berasal dari limbah rumah tangga berupa sisa makanan dan bahan organik lainnya yang sebenarnya dapat diolah kembali menjadi produk yang lebih bermanfaat.

Namun demikian, pengelolaan sampah organik di banyak daerah di Indonesia masih belum optimal. Sampah-sampah tersebut umumnya hanya dibuang ke tempat pembuangan akhir (TPA) tanpa proses pemilahan, pengolahan, maupun daur ulang. Akibatnya, TPA menjadi cepat penuh, menimbulkan bau tak sedap, serta menjadi sumber pencemaran tanah, air, dan udara. Di samping itu, pembusukan sampah organik menghasilkan gas metana yang berkontribusi terhadap pemanasan global.

Provinsi Jawa Barat sebagai salah satu wilayah dengan jumlah penduduk terbanyak di Indonesia juga menghadapi tantangan besar dalam pengelolaan sampah. Jawa Barat menghasilkan sekitar 27.000 ton sampah per hari, dan sebagian besar masih ditangani secara konvensional melalui sistem kumpul-angkut-buang. Dalam upaya mengatasi permasalahan tersebut, Gubernur Jawa Barat telah mengeluarkan sejumlah kebijakan strategis, antara lain Gerakan Zero Waste Cities, pelarangan penggunaan kantong plastik di pusat perbelanjaan, serta mendorong pembentukan bank sampah dan fasilitas pengolahan sampah terpadu di setiap kabupaten dan kota. Kebijakan ini dimaksudkan untuk mendorong pola pikir dan perilaku masyarakat agar lebih peduli terhadap lingkungan serta memperkuat sistem pengelolaan sampah dari hulu ke hilir.

Kota Banjar, seperti banyak kota lainnya, menghadapi tantangan serius dalam pengelolaan sampah. Volume sampah yang terus meningkat, terutama dari limbah organik rumah tangga dan pasar, memerlukan solusi yang inovatif dan berkelanjutan. Berdasarkan data dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjar, volume sampah organik terus mengalami peningkatan dari tahun 2020 hingga 2024. Berikut merupakan data dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjar mengenai laporan jumlah sampah periode tahun 2020-2024.

Tabel 1.1
LAPORAN JUMLAH SAMPAH PER TAHUN DI KOTA BANJAR

No	Jenis Sampah	Volume Sampah (ton)	Tahun
1.	Sampah organik	320,25	2020
	Sampah anorgank	148,25	2020
	Sampah Bahan Berbahaya dan beracun	150,12	2020
2.	Sampah organik	332,53	2021
	Sampah anorgank	150,12	2021

**INOVASI PEMERINTAH KOTA DI DALAM PEMANFAATAN
SAMPAH ORGANIK DI KOTA BANJAR**

	Sampah Bahan Berbahaya dan beracun	151,14	2021
3.	Sampah organik	333,55	2022
	Sampah anorgank	151,13	2022
	Sampah Bahan Berbahaya dan beracun	149,25	2022
4.	Sampah organik	407,66	2023
	Sampah anorgank	149,09	2023
	Sampah Bahan Berbahaya dan beracun	150,14	2023
5.	Sampah organik	408,76	2024
	Sampah anorgank	148,09	2024
	Sampah Bahan Berbahaya dan beracun	152,11	2024

Sumber: Laporan Sampah Organik Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjar 2024

Berdasarkan tabel di atas, maka tampak terlihat bahwa jumlah sampah dari tahun ketahun terus mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjar masih belum optimal.

Selain tantangan peningkatan volume sampah, kondisi infrastruktur pengelolaan sampah di Kota Banjar juga menjadi perhatian. Saat ini, Kota Banjar memiliki **1 (satu) Tempat Pembuangan Akhir (TPA)**, yaitu TPA Cibeureum yang berada di Dusun Pasirnagara RT 12 / RW 003 Desa Cibeureum Kecamatan Banjar Kota Banjar , serta **8 (delapan) Tempat Pembuangan Sementara (TPS)** yang tersebar di berbagai wilayah seperti TPS Pasar Banjar, TPS Kamisama, TPS Sentral, TPS Terminal, TPS Muktisari, TPS Langensari, TPS Neglasari, dan TPS Cibodas. Namun, sebagian besar TPS belum dilengkapi dengan sarana pendukung seperti mesin pencacah sampah, komposter, atau pengolah maggot BSF. Minimnya infrastruktur ini turut menyebabkan terhambatnya proses pengolahan limbah organik secara optimal.

Sebagai respons terhadap kondisi tersebut, Pemerintah Kota Banjar meluncurkan suatu inovasi yang diberi nama "Kamisama (Kawasan Minimasi Sampah Mandiri)" sebagai bentuk solusi untuk pengelolaan sampah organik yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Inovasi ini ditetapkan melalui Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Lembaga Pengelola Sampah. Peraturan ini mengatur **tugas, fungsi, struktur organisasi, serta mekanisme kerja lembaga pengelola sampah di tingkat kelurahan hingga RT/RW dalam upaya menciptakan sistem pengelolaan sampah yang partisipatif dan berkesinambungan.** TPS Kamisama sebagai inovasi **lingkungan yang diinisiasi oleh Pemerintah Kota Banjar** sebagai strategi untuk mengatasi permasalahan sampah, khususnya sampah organik, melalui pendekatan berbasis masyarakat. Program ini mendorong setiap rumah tangga, RT, RW, hingga kelurahan untuk **mengelola sampah secara mandiri**, dengan prinsip **pemilahan dari sumber, pengurangan, dan pemanfaatan sampah menjadi produk bernilai ekonomis maupun kompos.**

Adapun inovasi lain dalam pemanfaatan sampah di Kota Banjar yaitu melalui pengembangan **pakan maggot** dan **pengolahan kompos** sebagai upaya pengelolaan sampah

organik yang ramah lingkungan sekaligus memiliki nilai ekonomi. Salah satu bentuk pemanfaatan tersebut adalah budidaya maggot atau *Larva Black Soldier Fly* (BSF) yang mampu mengurai sampah organik, terutama sisa makanan dan limbah dapur, dalam waktu yang relatif singkat. Maggot hasil budidaya ini kemudian dimanfaatkan sebagai pakan ternak bernutrisi tinggi, seperti untuk ikan dan unggas. Kegiatan ini mulai diterapkan di beberapa lingkungan masyarakat Kota Banjar, baik secara individu maupun kelompok, sebagai bentuk pemberdayaan dan edukasi terhadap pentingnya pengelolaan sampah berbasis sumber. Selain itu, Kota Banjar juga mendorong pengolahan sampah organik menjadi kompos melalui metode fermentasi bahan organik seperti dedaunan, sisa sayuran, dan limbah pasar. Kompos yang dihasilkan dimanfaatkan untuk kebutuhan pertanian dan penghijauan serta mengurangi ketergantungan terhadap pupuk kimia. Inovasi-inovasi ini tidak hanya berperan dalam mengurangi volume sampah yang masuk ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA), tetapi juga mendukung terciptanya ekonomi sirkular di tingkat masyarakat serta memperkuat budaya pengelolaan sampah yang berkelanjutan di Kota Banjar.

Namun demikian dalam implementasinya, masih terdapat beberapa indikasi-indikasi sebagai berikut:

1. Alokasi anggaran untuk pengelolaan sampah organik masih minim dan tidak berkelanjutan.

Berikut merupakan data alokasi anggaran di Kota Banjar.

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjar Tahun 2025

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa alokasi anggaran untuk pengelolaan sampah organik di Kota Banjar dari tahun 2023 hingga 2025 masih tergolong kecil jika dibandingkan dengan total anggaran pengelolaan sampah secara keseluruhan. Meskipun ada peningkatan setiap tahunnya, anggaran untuk sampah organik belum menjadi prioritas utama. Sebagian besar dana masih difokuskan pada kegiatan pengangkutan dan pembuangan sampah ke TPA.

2. Kurangnya pemanfaatan teknologi sederhana seperti komposter atau biodigester di lingkungan masyarakat
3. Hasil olahan sampah organik seperti kompos dan biogas belum dikembangkan secara maksimal oleh pemerintah maupun masyarakat

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi, analisis data menggunakan reduksi data, data display dan kesimpulan atau verifikasi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjar merupakan salah satu instansi pemerintahan yang menjadi kepanjangan tangan dari pemerintah kota Banjar. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas lingkungan hidup Kota Banjar melakukan berbagai inovasi yang bertujuan agar adanya perubahan kearah yang lebih baik.

Dalam menjalankan kegiatan inovasi tersebut, maka pemerintah Dinas Lingkungan hidup kota Banjar melakukan perubahan-perubahan sehingga hasilnya lebih maksimal. Salah satu bentuk inovasi yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan hidup kota Banjar adalah dengan mengacu pada teori menurut Bruno dan Paula dalam Rahman dan Tarigan (2020:69-70):

1. Inovasi Agenda dengan indikator sebagai berikut:

- a. Adanya kebijakan tertulis yang secara khusus mengatur pengelolaan sampah organik dalam dokumen perencanaan daerah
Mengindikasikan adanya legitimasi formal dari pemerintah daerah melalui dokumen perencanaan strategis (seperti RPJMD atau Peraturan Daerah) yang secara eksplisit memuat regulasi mengenai pengelolaan sampah organik, sehingga memberikan landasan hukum dan arah kebijakan yang jelas dalam implementasinya.
 - b. Tersedianya anggaran rutin dan terencana untuk program pengelolaan sampah organik dalam APBD
Menunjukkan komitmen fiskal pemerintah daerah melalui pengalokasian dana secara berkala dan terstruktur dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang diperuntukkan bagi kegiatan operasional, pengembangan, dan evaluasi program pengelolaan sampah organik secara berkelanjutan
2. Inovasi Proses dengan indikator sebagai berikut:
- a. Pelaksanaan sistem pemilahan sampah organik dan anorganik di tingkat rumah tangga.
Merupakan penerapan praktik pengelolaan sampah berbasis sumber yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam memisahkan jenis sampah sejak dari rumah tangga, sebagai bentuk preventif terhadap penumpukan limbah dan untuk mempermudah proses pengolahan lebih lanjut
 - b. Penggunaan teknologi pengolahan sampah organik seperti komposter atau biodigester oleh pemerintah atau masyarakat
Mengacu pada penerapan perangkat teknologi tepat guna seperti komposter atau biodigester untuk mempercepat proses dekomposisi sampah organik, baik oleh lembaga pemerintah maupun masyarakat, sehingga menghasilkan produk yang bermanfaat secara ekologis dan ekonomis.
3. Inovasi produk dengan indikator sebagai berikut:
- a. Terbentuknya produk turunan dari sampah organik seperti kompos, biogas, atau *eco-enzym*
Menunjukkan adanya kemampuan untuk mentransformasikan sampah organik menjadi produk baru yang memiliki fungsi dan nilai guna, seperti kompos sebagai pupuk alami, biogas sebagai sumber energi alternatif, atau *eco-enzym* sebagai larutan pembersih ramah lingkungan.
 - b. Produk hasil olahan sampah organik memiliki nilai jual dan dipasarkan secara berkelanjutan
Menggambarkan adanya kesinambungan dalam proses produksi dan pemasaran produk olahan sampah organik, yang tidak hanya memberikan manfaat ekologis tetapi juga menciptakan nilai ekonomi melalui mekanisme pasar.
4. Inovasi simbolis dengan indikator sebagai berikut:
- a. Pelaksanaan kampanye atau gerakan masyarakat seperti “Gerakan Pilah Sampah dari Rumah
Merupakan bentuk inovasi berbasis partisipasi sosial yang dilakukan melalui kampanye atau gerakan kolektif untuk meningkatkan kesadaran dan perubahan perilaku masyarakat terhadap pentingnya pemilahan dan pengelolaan sampah organik dari lingkungan rumah tangga.
 - b. Penggunaan media sosial, slogan, atau maskot kota yang menggambarkan komitmen terhadap pengelolaan sampah organik.

Merujuk pada pemanfaatan instrumen komunikasi visual dan digital seperti media sosial, slogan edukatif, atau maskot kota sebagai simbol kampanye lingkungan yang merepresentasikan nilai-nilai keberlanjutan dan keseriusan pemerintah atau masyarakat dalam menangani isu pengelolaan sampah organik

Lebih jelasnya pelaksanaan indikator ini tampak sebagaimana dalam deskripsi berikut ini.

4.1.1 Inovasi Agenda

Inovasi agenda merupakan bentuk pembaruan yang berorientasi pada aspek kebijakan dan perencanaan strategis dalam sistem pemerintahan. Menurut Bruno dan Paula dalam Rahman dan Tarigan (2020:69-70), inovasi agenda berkaitan dengan adanya perubahan atau penyesuaian arah kebijakan yang dirumuskan secara formal dalam dokumen perencanaan pembangunan, baik jangka pendek maupun jangka menengah. Inovasi ini mencerminkan komitmen institusional untuk mengintegrasikan isu-isu penting dalam hal ini pengelolaan sampah organik ke dalam prioritas pembangunan daerah. Dengan di dukung oleh dua indikator yaitu adanya kebijakan tertulis yang secara khusus mengatur pengelolaan sampah organik dalam dokumen perencanaan daerah dan Tersedianya anggaran rutin dan terencana untuk program pengelolaan sampah organik dalam APBD. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan kedua indikator tersebut maka penulis melakukan wawancara kepada 10 orang informan, tampak sebagaimana dalam deskripsi berikut ini.

- a. Adanya kebijakan tertulis yang secara khusus mengatur pengelolaan sampah organik dalam dokumen perencanaan daerah

Indikator pertama yang diajukan dalam dimensi inovasi agenda adalah adanya kebijakan tertulis yang secara khusus mengatur pengelolaan sampah organik dalam dokumen perencanaan daerah.. hasil wawancara diketahui bahwa Kota Banjar telah memiliki kebijakan tertulis yang mendukung pengelolaan sampah organik secara berkelanjutan, dan implementasinya berjalan aktif dengan dukungan lintas sektor.

Untuk melengkapi hasil wawancara di atas, maka dilakukan observasi, dengan hasil bahwa di beberapa lokasi TPS 3R telah tersedia fasilitas pengolahan sampah organik seperti komposter, alat pencacah sampah, dan tempat pengeringan kompos. Di lingkungan warga, terlihat adanya ember komposter dan area kecil untuk pengolahan limbah dapur.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di atas, maka jelas Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjar tidak hanya memiliki kebijakan formal, namun juga melaksanakan program-program yang konkret dan menyentuh masyarakat secara langsung dalam pengelolaan sampah organik.

Hal ini sejalan dengan pendapat Nurhadi (2013:102) yang menyatakan bahwa keberadaan kebijakan lingkungan yang tertulis dan terstruktur akan lebih efektif apabila didukung oleh pelaksanaan yang konsisten dan partisipatif dari seluruh pihak, baik pemerintah maupun masyarakat.

- b. Tersedianya anggaran rutin dan terencana untuk program pengelolaan sampah organik dalam APBD.

Indikator kedua yang diajukan dalam dimensi inovasi agenda adalah Tersedianya anggaran rutin dan terencana untuk program pengelolaan sampah organik dalam APBD. Hasil wawancara diketahui bahwa alokasi anggaran untuk pengelolaan sampah organik memang ada, tetapi jumlahnya masih sangat kecil dibandingkan dengan total anggaran

pengelolaan sampah secara umum, dan belum terprogram secara sistematis dari tahun ke tahun.

Untuk melengkapi hasil wawancara di atas, maka dilakukan observasi, dengan hasil bahwa fasilitas pendukung seperti komposter, alat pengolah sampah organik, serta pelatihan teknis masih sangat terbatas dan hanya tersedia di beberapa titik, terutama yang didukung oleh mitra luar seperti LSM atau program CSR.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di atas, maka jelas Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjar masih menghadapi keterbatasan dalam menyediakan anggaran yang cukup dan berkelanjutan untuk pengelolaan sampah organik. Sebagian besar kegiatan masih bergantung pada bantuan eksternal, sementara alokasi dari APBD belum menjadi prioritas utama.

Hambatan utama yang dihadapi oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjar dalam pengalokasian anggaran untuk pengelolaan sampah organik di Kota Banjar meliputi minimnya anggaran khusus yang rutin dan berkelanjutan, dominasi prioritas anggaran pada pengangkutan dan pengelolaan akhir (TPA), lemahnya dukungan kebijakan internal, keterbatasan ruang fiskal, serta kurangnya perencanaan jangka panjang. Upaya yang telah dilakukan antara lain menjalin kerja sama dengan pihak ketiga (LSM/CSR), mengintegrasikan kegiatan pengelolaan sampah organik ke dalam program lingkungan lainnya, menyusun rencana aksi tahunan agar bisa masuk dalam penganggaran, melakukan sosialisasi internal agar program ini dipahami sebagai kebutuhan, serta mendorong masyarakat untuk melakukan inisiatif mandiri dengan sumber daya yang terbatas

Hal ini sejalan dengan pendapat Putra (2014:92) yang menyatakan bahwa kebijakan lingkungan yang tidak didukung oleh alokasi anggaran yang memadai akan menyebabkan ketidakterlaksanaan program secara optimal, dan pada akhirnya membuat masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap peran pemerintah.

4.1.2 Inovasi Proses

Inovasi proses merupakan bentuk pembaruan atau perbaikan dalam pelaksanaan kegiatan, tata cara, atau metode yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu secara lebih efektif dan efisien. Dalam konteks pengelolaan sampah organik di Kota Banjar, inovasi proses berperan penting untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi layanan persampahan, sekaligus mendorong partisipasi masyarakat. Dengan di dukung oleh dua indikator yaitu Pelaksanaan sistem pemilahan sampah organik dan anorganik di tingkat rumah tangga dan Penggunaan teknologi pengolahan sampah organik seperti komposter atau biodigester oleh pemerintah atau masyarakat. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan kedua indikator tersebut maka penulis melakukan wawancara kepada 10 orang informan, tampak sebagaimana dalam deskripsi berikut ini.

a. Pelaksanaan sistem pemilahan sampah organik dan anorganik di tingkat rumah tangga

Indikator pertama yang diajukan dalam dimensi inovasi proses adalah Pelaksanaan sistem pemilahan sampah organik dan anorganik di tingkat rumah tangga. Berdasarkan hasil wawancara di atas, baik dengan kepala dinas, kabag lingkungan, pegawai maupun masyarakat, maka dapat disimpulkan bahwa sistem pemilahan sampah organik dan anorganik telah diterapkan di tingkat rumah tangga di Kota Banjar, khususnya pada wilayah yang menjadi sasaran program percontohan dan yang telah mendapatkan intervensi edukatif dari pemerintah dan mitra terkait.

Untuk melengkapi hasil wawancara di atas, maka dilakukan observasi, dengan hasil bahwa sebagian besar rumah tangga di wilayah percontohan telah memiliki dua wadah

sampah berbeda dan menunjukkan praktik pemilahan sampah organik dan anorganik, terutama di kawasan RW binaan dan yang berdekatan dengan unit pengelolaan kompos.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di atas, maka Pemerintah Kota Banjar melalui Dinas Lingkungan Hidup telah berhasil mendorong pelaksanaan pemilahan sampah rumah tangga sebagai bagian dari inovasi proses pengelolaan lingkungan yang partisipatif, yaitu melalui penerapan sistem pemisahan sampah organik dan anorganik langsung dari sumbernya (rumah tangga). Inovasi ini diwujudkan melalui pendekatan edukatif, penyediaan sarana prasarana (seperti dua wadah sampah), serta pelibatan aktif masyarakat melalui kelompok dasawisma, kader lingkungan, karang taruna, dan kerja sama dengan LSM maupun bank sampah. Pemilahan dilakukan dengan cara memisahkan sisa makanan, dedaunan, dan limbah dapur sebagai sampah organik, serta plastik, botol, dan kemasan lainnya sebagai sampah anorganik. Program ini menjadi langkah awal menuju pengurangan volume sampah yang dibuang ke TPA dan meningkatkan potensi daur ulang maupun pengomposan, serta menciptakan budaya bersih dan peduli lingkungan di tingkat warga secara berkelanjutan.

Hal ini sejalan dengan pendapat Mulyadi (2018:123) yang menyatakan bahwa inovasi proses dalam pelayanan publik dapat berjalan optimal apabila adanya dukungan kelembagaan, pendampingan, dan keterlibatan langsung dari masyarakat sebagai pelaku utama perubahan perilaku.

b. Penggunaan teknologi pengolahan sampah organik seperti komposter atau biodigester oleh pemerintah atau masyarakat

Indikator kedua yang diajukan dalam dimensi inovasi proses adalah Penggunaan teknologi pengolahan sampah organik seperti komposter atau biodigester oleh pemerintah atau masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara di atas, baik dengan kepala dinas, kabag lingkungan, pegawai maupun masyarakat, maka dapat disimpulkan bahwa penggunaan teknologi pengolahan sampah organik seperti komposter dan biodigester belum berkembang di Kota Banjar. Hambatan yang dihadapi bersifat multidimensi: teknis, sosial, kultural, dan struktural.

Untuk melengkapi hasil wawancara di atas, maka dilakukan observasi, dengan hasil bahwa tidak ditemukan penggunaan aktif teknologi komposter maupun biodigester baik di lingkungan permukiman maupun kantor-kantor dinas. Sampah masih dicampur dan langsung dikumpulkan oleh petugas angkut ke TPS tanpa pengolahan awal.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di atas, maka jelas Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjar masih menghadapi berbagai tantangan dalam implementasi teknologi pengolahan sampah organik dan belum berhasil menjadikan teknologi ini sebagai bagian dari sistem pengelolaan yang terintegrasi.

Hambatan utama yang dihadapi mencakup kurangnya sosialisasi dan edukasi teknis kepada masyarakat serta minimnya pengetahuan teknis dari petugas lapangan. Banyak masyarakat yang tidak memahami cara penggunaan alat-alat tersebut karena tidak ada pendampingan yang memadai. Selain itu, keterbatasan lahan di kawasan padat penduduk menjadi tantangan tersendiri, karena sebagian besar warga tidak memiliki ruang yang cukup untuk menempatkan komposter atau biodigester. Hambatan lain yang cukup signifikan adalah rendahnya kesadaran dan budaya memilah sampah di tingkat rumah tangga, sehingga masyarakat lebih memilih membuang sampah secara langsung ke TPS daripada mengolahnya sendiri. Masalah internal juga muncul dari kurangnya keteladanan, di mana

instansi pemerintah sendiri belum secara konsisten menerapkan teknologi pengolahan sampah. Keterbatasan anggaran, tenaga teknis, serta tidak adanya insentif atau motivasi tambahan bagi masyarakat turut memperkuat tantangan ini. Untuk mengatasi hambatan tersebut, Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjar telah melakukan beberapa upaya meskipun hasilnya belum maksimal. Upaya yang dilakukan antara lain adalah program pembagian alat komposter kepada warga, meski belum disertai pendampingan teknis yang berkelanjutan. Selain itu, dinas mengusulkan pelatihan teknis dan kerja sama dengan lembaga lingkungan, namun masih terkendala realisasi. Upaya lain yang dirancang mencakup pembuatan panduan tertulis mengenai cara penggunaan komposter, pengusulan pengadaan komposter vertikal dan skala komunal untuk mengatasi kendala lahan sempit, serta menjadikan kantor dinas sebagai proyek percontohan agar dapat menjadi model bagi masyarakat. Kampanye-kampanye terbatas juga dilakukan, terutama saat peringatan hari lingkungan hidup, untuk meningkatkan kesadaran publik.

Hal ini sejalan dengan pendapat Nugroho (2016:88) yang menyatakan bahwa inovasi teknologi lingkungan di tingkat lokal akan sulit diterapkan apabila tidak didukung oleh pemahaman masyarakat, fasilitas yang memadai, serta komitmen berkelanjutan dari pemerintah.

4.1.3 Inovasi Produk

Inovasi produk merupakan salah satu bentuk pengembangan dalam pengelolaan sampah organik yang bertujuan untuk meningkatkan nilai guna dan nilai jual dari limbah tersebut. Dengan di dukung oleh dua indikator yaitu Terbentuknya produk turunan dari sampah organik seperti kompos, biogas, atau *eco-enzym* dan Produk hasil olahan sampah organik memiliki nilai jual dan dipasarkan secara berkelanjutan. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan kedua indikator tersebut maka penulis melakukan wawancara kepada 10 orang informan, tampak sebagaimana dalam deskripsi berikut ini.

- a. Terbentuknya produk turunan dari sampah organik seperti kompos, biogas, atau *eco-enzym*

Indikator pertama yang diajukan dalam dimensi inovasi produk adalah Terbentuknya produk turunan dari sampah organik seperti kompos, biogas, atau *eco-enzym*. Menurut Zhang et al. (2018:102), *eco-enzyme* atau *garbage enzyme* merupakan hasil fermentasi limbah organik seperti sisa buah dan sayuran dengan bahan gula dan air dalam rasio tertentu, yang menghasilkan cairan multifungsi ramah lingkungan. *Eco-enzym* mengandung enzim, protein, dan asam organik yang bermanfaat untuk meningkatkan kualitas tanah, air, dan dapat digunakan sebagai pupuk cair, pestisida alami, serta pembersih rumah. Berdasarkan hasil wawancara di atas, baik dengan kepala dinas, kabag lingkungan, pegawai maupun masyarakat, maka dapat disimpulkan bahwa pengelolaan sampah organik di Kota Banjar telah menghasilkan berbagai produk turunan seperti kompos dan *eco-enzym*, serta sedang mengembangkan biogas. Program ini diterima dengan baik oleh masyarakat dan dilaksanakan secara kolaboratif.

Untuk melengkapi hasil wawancara di atas, maka dilakukan observasi, dengan hasil bahwa lokasi seperti taman kota, dan kantor kelurahan ditemukan adanya instalasi komposter aktif, botol *eco-enzym* hasil olahan masyarakat, serta kebun kecil yang menggunakan kompos buatan sendiri.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di atas, maka dapat dikatakan bahwa indikator terbentuknya produk turunan dari sampah organik telah terpenuhi. Hal ini menunjukkan adanya inovasi produk dalam pengelolaan sampah organik di Kota Banjar.

Hal ini sejalan dengan pendapat Suharti (2020:5), yang menyatakan bahwa inovasi pengelolaan sampah organik melalui produksi kompos dan *eco-enzym* dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dan memberikan nilai tambah secara ekonomi dan ekologis.

b. Produk hasil olahan sampah organik memiliki nilai jual dan dipasarkan secara berkelanjutan

Indikator kedua yang diajukan dalam dimensi inovasi produk adalah Produk hasil olahan sampah organik memiliki nilai jual dan dipasarkan secara berkelanjutan. Untuk melengkapi hasil wawancara di atas, maka dilakukan observasi, dengan hasil bahwa produk olahan seperti kompos dan *eco-enzym* belum dijual secara terbuka di pasar umum, tidak tersedia di toko pertanian setempat, dan belum ada kemasan komersial atau label produk.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di atas, maka indikator kedua belum sepenuhnya terpenuhi, karena produk olahan masih bersifat terbatas dan belum memiliki pasar tetap. *Eco-enzym* menurut Muliarta (2021:6-11) bahwa "*Eco-enzym* merupakan cairan hasil fermentasi limbah organik rumah tangga, seperti kulit buah dan sayur, dengan gula dan air, yang bermanfaat untuk pengolahan limbah, peningkatan kualitas air dan tanah, serta sebagai pembersih ramah lingkungan."

Hambatan utama yang dihadapi kurangnya permintaan pasar, belum adanya strategi pemasaran yang efektif, keterbatasan dalam pengemasan produk, dan rendahnya pengetahuan masyarakat terhadap manfaat produk olahan sampah organik. Sedangkan Upaya yang dilakukan antara lain adalah dengan memberikan pelatihan kepada masyarakat tentang manfaat dan cara penggunaan produk, memperbaiki kemasan dan branding produk, menjalin kerja sama dengan komunitas tani dan pelaku UMKM, serta mendorong promosi melalui media sosial dan kegiatan lingkungan.

Hal ini sejalan dengan pendapat Nuryani (2019:8), yang menyatakan bahwa salah satu tantangan terbesar dalam pengelolaan sampah berbasis ekonomi adalah menciptakan pasar bagi produk hasil daur ulang atau olahan organik, yang memerlukan strategi promosi dan edukasi yang tepat.

4.1.4 Inovasi Simbolis

Inovasi simbolis merujuk pada penggunaan simbol atau lambang yang memiliki makna khusus dan dapat mewakili nilai-nilai, ide, atau konsep tertentu dalam konteks sosial, budaya, atau organisasional. Ini dapat mencakup penggunaan logo, slogan, atau simbol lainnya yang dirancang untuk membangun identitas, mengkomunikasikan pesan, atau merepresentasikan suatu entitas atau gagasan secara simbolis. Dengan di dukung oleh dua indikator yaitu Pelaksanaan kampanye atau gerakan masyarakat seperti "Gerakan Pilah Sampah dari Rumah" dan Penggunaan media sosial, slogan, atau maskot kota yang menggambarkan komitmen terhadap pengelolaan sampah organik. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan kedua indikator tersebut maka penulis melakukan wawancara kepada 10 orang informan, tampak sebagaimana dalam deskripsi berikut ini.

a. Pelaksanaan kampanye atau gerakan masyarakat seperti "Gerakan Pilah Sampah dari Rumah"

Indikator pertama yang diajukan dalam dimensi inovasi simbolis adalah Pelaksanaan kampanye atau gerakan masyarakat seperti "Gerakan Pilah Sampah". Untuk melengkapi hasil wawancara di atas, maka dilakukan observasi, dengan hasil bahwa di beberapa lingkungan RW dan fasilitas publik telah tersedia tempat sampah terpilah, poster edukasi pemilahan sampah, serta adanya jadwal rutin penyuluhan lingkungan oleh kader DLH.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di atas, maka dapat dikatakan indikator inovasi simbolis terkait kampanye pilah sampah telah berjalan baik dan memberikan pengaruh nyata terhadap kesadaran masyarakat.

Hal ini sejalan dengan pendapat Suwartini (2021:9), yang menyatakan bahwa keterlibatan aktif pemerintah daerah melalui kampanye lingkungan secara konsisten dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah berbasis rumah tangga.

- b. Penggunaan media sosial, slogan, atau maskot kota yang menggambarkan komitmen terhadap pengelolaan sampah organik

Indikator kedua yang diajukan dalam dimensi inovasi simbolis adalah Penggunaan media sosial, slogan, atau maskot kota yang menggambarkan komitmen terhadap pengelolaan sampah organik. Berdasarkan hasil wawancara di atas, baik dengan kepala dinas, kabag lingkungan, pegawai maupun masyarakat, maka dapat disimpulkan bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjar telah menerapkan strategi simbolis melalui pemanfaatan media sosial dan penggunaan slogan-slogan lingkungan yang mencerminkan komitmen terhadap pengelolaan sampah organik.

Untuk melengkapi hasil wawancara di atas, maka dilakukan observasi, dengan hasil bahwa sosial resmi Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjar aktif memposting konten edukasi tentang pengelolaan sampah organik, kegiatan pelatihan kompos dan *eco-enzym*, serta menyisipkan slogan 'Banjar Hijau' dan 'Banjar Bersih'. Namun belum ditemukan adanya maskot resmi atau visual karakter kota yang digunakan sebagai simbol edukatif.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di atas, maka dapat dikatakan strategi inovasi simbolis melalui media sosial dan slogan telah diimplementasikan secara baik oleh Pemerintah Kota Banjar, khususnya Dinas Lingkungan Hidup, dalam membangun kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan sampah organik.

Hal ini sejalan dengan pendapat Siregar (2023:6) yang menyatakan bahwa penggunaan media sosial dan simbol-simbol visual seperti slogan atau maskot merupakan strategi efektif dalam membangun komitmen kolektif masyarakat terhadap isu lingkungan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian tentang Inovasi Pemerintah Kota dalam Pemanfaatan Sampah Organik di Kota Banjar, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Inovasi Agenda
Pemerintah Kota Banjar telah menerbitkan kebijakan yang mengatur pengelolaan sampah organik secara formal, seperti Peraturan Wali Kota Nomor 18 Tahun 2022. Selain itu, alokasi anggaran dalam APBD untuk program pengelolaan sampah organik juga telah tersedia. Namun, alokasi ini masih terbatas dan belum sepenuhnya memadai untuk menjangkau seluruh kebutuhan pengelolaan yang berkelanjutan.
2. Inovasi Proses
Pelaksanaan pemilahan sampah organik di tingkat rumah tangga sudah mulai diterapkan, terutama di lingkungan yang telah mendapat sosialisasi dan pendampingan. Akan tetapi, penggunaan teknologi seperti komposter dan biodigester masih belum optimal karena kurangnya sosialisasi, minimnya tenaga teknis, serta keterbatasan anggaran dan SDM.
3. Inovasi Produk
Hasil olahan sampah organik seperti kompos dan pakan maggot telah dihasilkan dan digunakan, namun belum berkembang secara maksimal. Hambatan utama terletak pada pemasaran produk yang masih lemah dan belum adanya sistem distribusi berkelanjutan.

4. Inovasi Simbolis

Pemerintah Kota Banjar telah berhasil membangun kesadaran masyarakat melalui kampanye seperti “Gerakan Pilah Sampah dari Rumah” serta pemanfaatan media sosial dan slogan lingkungan seperti “Banjar Hijau”. Upaya ini dinilai berhasil karena pesan lingkungan telah sampai ke masyarakat meski masih perlu penguatan secara visual seperti penggunaan maskot.

5.1 Saran

Bertolak belakang dari kesimpulan diatas maka terdapat beberapa saran sebagai berikut:

1. Pemerintah Kota Banjar sebaiknya meningkatkan porsi dan keberlanjutan anggaran untuk pengelolaan sampah organik dalam APBD, serta memperluas cakupan wilayah implementasi kebijakan agar seluruh kelurahan dan lingkungan dapat merasakan dampaknya secara merata.
2. Dinas terkait perlu memperluas pelatihan dan sosialisasi penggunaan teknologi pengolahan sampah seperti komposter dan biodigester kepada masyarakat. Selain itu, perlu ditingkatkan jumlah dan kapasitas tenaga teknis yang dapat mendampingi masyarakat dalam praktik pengolahan sampah secara mandiri.
3. Pemerintah perlu memfasilitasi jalur pemasaran dan distribusi produk hasil olahan sampah organik, misalnya melalui kerja sama dengan koperasi, UMKM, atau platform digital. Dukungan berupa pelabelan, legalitas produk, dan promosi juga diperlukan agar produk tersebut dapat diterima secara luas di pasar
4. Peneliti berikutnya disarankan untuk mengkaji efektivitas kebijakan pengelolaan sampah organik secara lebih mendalam, termasuk menganalisis keterlibatan aktor non-pemerintah seperti LSM, swasta, atau komunitas lokal. Penelitian selanjutnya juga dapat memperluas wilayah studi dan menggunakan pendekatan kuantitatif untuk mengukur dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan secara lebih terukur.
5. Bagi peneliti yang akan datang, disarankan untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan cakupan yang lebih luas seperti menelusuri peran lintas sektor (pemerintah, masyarakat, swasta), serta mengukur dampak inovasi terhadap perubahan perilaku masyarakat dan keberlanjutan lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Afifudin. (2010). *Metode penelitian sosial*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Apriadi. (2015). *Menghindari, Mengolah dan menyingkirkan Sampah*, Jakarta: Abdi Tandur. Hal.15
- Braasz. (2017). Model evaluasi kinerja. Dalam Supriatna (Ed.), *Evaluasi kinerja manajerial* (hlm. 3). Bandung: Alfabeta
- Buffa, E. S., Butler, D. P., & Miller, J. G. (2016). Operasi bisnis. Dalam Zulfa Nurdin (Ed.), *Manajemen operasional* (hlm. 47). Jakarta: Kencana.
- Coyne. (2016). Strategi dan inovasi organisasi. Dalam Zulfa Nurdin (Ed.), *Manajemen strategis* (hlm. 51). Jakarta: Kencana.
- Drucker, P. F. (2021). *Management challenges for the 21st century*. Harper Business.

- Indriantoro, N., & Supomo, B. (2018). Metodologi penelitian bisnis. Dalam Sugiyono (Ed.), *Metodologi penelitian kombinasi* (hlm. 146). Bandung: Alfabeta
- Lestari, D. (2020). *Inovasi Pemanfaatan Sampah Rumah Tangga Melalui Maggot BSF*. Jurnal Inovasi Lingkungan, 5(1), 88–97
- Luecke, R. (2003). *Managing creativity and innovation*. Harvard Business School Press.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (2018). Analisis data kualitatif. Dalam Sugiyono (Ed.), *Metode penelitian kualitatif* (hlm. 284). Bandung: Alfabeta
- Mulyadi. (2018). *Inovasi pelayanan publik berbasis partisipasi*. Yogyakarta: Gava Media.
- Nugroho, R. (2016). *Inovasi teknologi dan lingkungan: Antara tantangan dan peluang*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Nurhadi. (2013). *Kebijakan lingkungan dan partisipasi masyarakat*. Jakarta: Pustaka Rakyat.
- Nuryani. (2019). *Ekonomi sirkular dan tantangan daur ulang di Indonesia*. Malang: UMM Press.
- Putra, A. Y. (2014). *Manajemen kebijakan publik: Studi kasus lingkungan daerah*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Rahman, Fathur dan Targan, SR, Janwan (2020). *Inovasi Pemerntahan*. Intrans Publishin
- Riduwan. (2014). *Belajar mudah penelitian untuk guru, karyawan, dan peneliti pemula*. Bandung: Alfabeta
- Rogers, E. M. (2015). *Diffusion of innovations* (5th ed.). Free Press.
- Schumpeter, J. A. (2016). *Capitalism, socialism, and democracy*. Harper & Brothers.
- Soewedo Hadi Wiyoto. (2013). *Penanganan Dan Pemanfaatan Sampah*, Idayu Press, hal.13
- Strong, C. F. (2016). *Modern constitution*. Oxford University Press.
- Sucipto. (2012). *Manajemen Pengelolaan Sampah Kota*. Surabaya: Universitas Negeri Surabaya Press
- Suharti. (2020). *Pengelolaan sampah organik berbasis masyarakat*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Sularso, E., & Kurniawan, A. (2018). *Manajemen pengelolaan sampah*.
- Suryana. (2014). *Kewirausahaan: Pendekatan karakteristik wirausaha sukses*. Kencana.
- Suwartini. (2021). *Strategi pemerintah daerah dalam kampanye lingkungan*. Surakarta: UNS Press
- Terry, G. R. (2017). *Principles of management*. Richard D. Irwin.
- Utami, E. (2013). *Pengelolaan Sampah Berbasis Rumah Tangga*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Wicaksono, A. (2021). *Pemanfaatan Sampah Organik menjadi Kompos di Perkotaan*. Jurnal Lingkungan dan Energi, 8(1), 55–63

Artikel/Jurnal:

Apter, D. (2019). Modernisasi politik dalam konteks global. *Political Science Review*, 12(4), 201–212

Riyadi. (2017). Pengelolaan sampah berbasis masyarakat. *Jurnal Pengelolaan Sampah*, 5(2), 45–58.

Sayre, W. S. (2020). Administrasi publik dalam perspektif politik. *Journal of Public Administration Studies*, 5(3), 21–30.

Siregar, H. (2023). Pengaruh media sosial dan simbol visual dalam edukasi lingkungan masyarakat. *Jurnal Komunikasi dan Pembangunan*, 11(2), 55–64.

Prasetyo, E. (2019). *Strategi Pengelolaan Sampah Organik melalui Budidaya Maggot*. Jurnal Teknologi Lingkungan, 17(2), 104–112

Riyadi (2017) dalam jurnal pengelolaan sampah berbasis masyarakat

Undang-undang:

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Sampah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik.

Peraturan WaliKota Banjar. Nomor 3 Tahun 2014. *Tentang Pembentukan Lembaga Pengelola Sampah*.

Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Peng